

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari gambaran demografi bahwa terdapat 726 suku bangsa dengan 116 bahasa daerah dan terdapat 6 (enam) jenis agama. (*Koran Tempo, 16 Agustus 2012. Pluralisme Sebagai Kekuatan*). Tidak ada satu pun Negara di dunia yang memiliki keberagaman sebesar Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Eka sudah ada sejak kerajaan Majapahit, pada abad ke 13 Bangsa Indonesia sudah beraneka ragam.

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional, apabila terdapat kondisi ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial, ekonomi, kemiskinan serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali.

Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan merebaknya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horisontal. Sumber konflik tersebut bisa berasal dari perbedaan nilai-nilai ideologi, maupun intervensi kepentingan luar negeri yang bahkan dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Konflik tersebut apabila didukung oleh kekuatan nyata yang terorganisir tentunya akan menjadi musuh yang potensial bagi NKRI. Contoh nyata dari konflik sosial yang sering terjadi adalah konflik yang timbul dalam pergaulan umat beragama baik intern maupun antar umat beragama seperti munculnya kekerasan, perusakan rumah ibadah dan kekerasan agama lainnya yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Konflik bernuansa sentemen agama yang baru saja terjadi pada saat

umat Muslim Tolikara merayakan hari raya Idul Fitri pada tanggal 17 Juli 2015 telah dinodai terjadinya pembakaran mesjid di Tolikara Papua oleh sekelompok oknum yang disinyalir berasal dari kelompok GIDI (Rina Juwita. Opini Publik Kaltim Post, 23 Juli 2015), Peristiwa kekerasan agama ini kembali menimbulkan kecemasan masyarakat Indonesia yang terus menerus mengalami pasang surut intoleransi beragama baik yang dilakukan oleh penganut mayoritas maupun minoritas yang menganggap perbedaan adalah hal yang tidak bisa diterima. Kebrutalan atas nama agama dan keyakinan terdokumentasi dari waktu ke waktu yang berpotensi memecah belah NKRI dan menimbulkan kekhawatiran bagi kita semua masyarakat Indonesia.

Di samping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang semakin terbuka mengakibatkan semakin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing. Kondisi-kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan konflik, baik konflik horisontal maupun vertikal. Konflik tersebut, terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, menciptakan rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis (dendam, kebencian dan perasaan permusuhan), sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

Konflik mengandung spektrum pengertian yang sangat luas, mulai dari konflik kecil antar perorangan, konflik antar keluarga sampai dengan konflik antar kampung dan bahkan sampai dengan konflik masal yang melibatkan beberapa kelompok besar, baik dalam ikatan wilayah ataupun ikatan primordial. Pada dasarnya, konflik dapat dibedakan antara konflik yang bersifat horisontal dan vertikal, dimana keduanya sama-sama besarnya berpengaruh terhadap upaya pemeliharaan kedamaian di negara ini.

Konflik horisontal yang dimaksudkan adalah konflik antar kelompok masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti ideologi politik, ekonomi dan faktor primordial. Sedangkan konflik vertikal maksudnya adalah konflik antara pemerintah/penguasa dengan warga masyarakat. Konflik

masal tidak akan terjadi secara serta merta, melainkan selalu diawali dengan adanya potensi yang mengendap di dalam masyarakat, yang kemudian dapat berkembang memanas menjadi ketegangan dan akhirnya memuncak pecah menjadi konflik fisik akibat adanya faktor pemicu konflik.

Beberapa contoh konkrit masalah konflik yang cukup serius baik yang bersifat vertikal ataupun horisontal yang terjadi pada akhir-akhir ini antara lain: (1) konflik yang bernuansa separatis di NAD, Maluku, dan Papua; (2) Konflik yang bernuansa etnis di Kalbar, Kalteng, dan Ambon; (3) Konflik yang bernuansa ideologis isu paham komunis, paham radikal; (4) Konflik yang bernuansa politis akibat isu kecurangan Pilkada, isu pemekaran wilayah di beberapa wilayah yang berakibat penyerangan dan pengrusakan; (5) Konflik yang bernuansa ekonomi konflik perkebunan di Mesuji; (6) Konflik bernuansa solidaritas liar tawuran antar wilayah, antar suporter sepak bola; (7) Konflik isu agama atau aliran kepercayaan isu berkaitan dengan SARA di Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, isu aliran sesat; dan (8) Konflik isu kebijakan pemerintah: BBM, BOS, LPG, dll.

Dari beberapa konflik tersebut di atas, SARA dan Dampak Industri; perkebunan, Ketenagakerjaan, dan ketenagakerjaan merupakan konflik yang sering terjadi dan sangat berpengaruh terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya menjelang Pemilihan Umum 2014. Oleh karenanya dalam rangka penanggulangan konflik, yang perlu diwaspadai bukan hanya faktor-faktor yang dapat memicu konflik, namun juga yang tidak kalah pentingnya adalah faktor-faktor yang dapat menjadi potensi atau sumber-sumber timbulnya konflik. (Jurnal Srigunting, Maret 15: 2013)

Fakta fenomena di atas juga didukung oleh Setara Institute telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebebasan beragama di Indonesia, telah mengungkapkan bahwa telah terjadi sekitar 220 kasus kekerasan beragama pada tahun 2013, pada tahun 2007 terdapat sekitar 91 kasus di seluruh Indonesia, artinya dari tahun ke tahun telah terjadi

peningkatan yang signifikan kasus kekerasan bernuansa agama (Kaltim Post, 23 Juli 2015).

Begitu juga dengan potensi bencana sosial di daerah Kaltim cukup tinggi (*Tribun Kaltim: 8 Agustus 2012*), potensi bencana social tersebut antara lain kerusuhan antar warga dan potensi konflik lainnya. Isu suku, agama, ras dan antar golongan (Sara) menjadi hal yang harus ditangani dan dikelola secara arif dan bijaksana, sehingga masyarakat tidak mudah terhasut dengan berbagai isu yang menyesatkan dan tidak jelas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab (provokator). Pengalaman pahit konflik bencana sosial di Kota Tarakan, Nunukan, Kutai Barat tahun 2012, Kota Balikpapan dan lainnya, jangan sampai terulang kembali.

Paparan Kapolri dalam rapat gabungan di Kompleks Gedung Parlemen Jakarta (Senin, 6 Juli 2015), Polri telah memetakan kerawanan provinsi yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 yang akan datang, kita harus waspada meskipun Kalimantan Timur termasuk dalam katagori 2 (dua) daerah rawan konflik pilkada serentak bersama dengan 14 (empat belas) daerah lainnya (*Tribun Kaltim, 8 Juli 2015*). Gejala potensi konflik lainnya saat ini di Kalimantan Timur seperti adanya sentemen antar etnis, masalah pertanahan dan lainnya yang perlu diidentifikasi dalam pelaksanaan pemetaan tahun ini.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa permasalahan konflik sosial begitu kompleks dan dinamis, dan terus mengalami perubahan, termasuk di potensi bencana sosial di wilayah Kalimantan Timur, salah satu alternative untuk mencari solusi pencegahan dan penanganan konflik sosial adalah perlunya pemetaan daerah rawan konflik sosial yang dilakukan oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kalimantan Timur, yang bertugas melakukan deteksi danantisipasi ada gejala potensi konflik yang dilakukan oleh masyarakat selain itu juga sebagai database informasi untuk membantu aparat terkait dalam rangka pencegahan potensi di daerah rawan konflik sosial. Untuk tahap pertama lokasi pemetaan identifikasi potensi

daerah rawan konflik sosial yaitu Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Barat.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan kegiatan pemetaan daerah rawan potensi konflik, antara lain :

1. Menggambarkan pemetaan daerah rawan konflik sosial di lokasi kegiatan berdasarkan faktor pemicu terjadinya konflik sosial.
2. Menggambarkan identifikasi faktor-faktor penyebab (akar masalah pemicu terjadinya bencana/ konflik sosial)
3. Menggambarkan alternatif solusi, pencegahan dan penanganan konflik sosial.
4. Sebagai informasi, data base FKDM Kalimantan Timur dalam rangka perencanaan kegiatan pencegahan konflik sosial.
5. Sebagai bahan informasi dan koordinasi FKDM Kalimantan Timur dengan lembaga dan stakeholder terkait dalam rangka pencegahan konflik sosial.

## **C. Sasaran**

Sasaran pemetaan daerah rawan konflik sosial di lokasi kegiatan yang menjadi informan atau responden pemetaan, antara lain :

1. Stakeholder, institusi terkait, seperti :
  - a. Polres Kab/Kota
  - b. Kesbangpol Kab/Kota
  - c. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab/Kota
  - d. Dinas Sosial Kab/Kota
  - e. Kementrian Agama
  - f. BPBD Kab/Kota
  - g. SKPD terkait lainnya.

2. Tokoh Masyarakat, meliputi :
  - a. Tokoh Agama
  - b. Tokoh Adat/ Budaya
  - c. Tokoh Pemuda
  - d. Tokoh Wanita
  - e. Lintas tokoh lainnya.
3. Organisasi/ Relawan Pelopor perdamaian, Lembaga Swadaya Masyarakat/ Forum kerukunan/ persatuan/ komunikasiantar umat/ adat/ etnis/ kelompok/golongan, antara lain :
  - a. FKDM Kab/Kota
  - b. FKP Kab/Kota
  - c. FKUB Kab/Kota
  - d. Polmas
  - e. Forum RT
  - f. Dan lainnya

#### **D. Hasil Yang Diharapkan**

Hasil yang diharapkan pekerjaan pemetaan daerah rawan konflik sosial, antara lain:

1. Teridentifikasinya faktor-faktor penyebab (akar masalah pemicu terjadinya konflik sosial) di lokasi kegiatan.
2. Teridentifikasi berbagai alternatif solusi, penanganan konflik sosial
3. Produk Peta potensi konflik di wilayah Kalimantan Timur.
4. Terciptanya komunikasi dan sinergitas yang baik pencegahan dan penyelesaian konflik kepada pihak terkait lainnya tingkat pusat dan daerah.